

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan berbagai aktivitas dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan melakukan pemerataan pendapatan. Pemerataan Pendapatan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional yang harapannya untuk merubah struktur perekonomian (Husnul, 2020). Dalam meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, pemerintah dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi dengan melakukan pemerataan pembangunan terhadap daerah-daerah yang berada dalam suatu negara.

Pembangunan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat, dan perbaikan pada kondisi kesehatan masyarakat akan mempengaruhi produktivitas kerja. Sehat adalah suatu keadaan sejahtera sempurna fisik, mental dan social yang tidak terbatas pada bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan jangka panjang.(Arsyad,1999:49). Beberapa pengalaman sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan penting di bidang kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit dan peningkatan gizi. Derajat kesehatan masyarakat berhubungan erat dengan kondisi pembangunan nasional khususnya pembangunan social ekonomi.

Pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi NTT ditentukan oleh banyak faktor, terutama ketersediaan sumber daya alam, sumber daya dana, sumber daya

manusia merupakan pelaku utama pembangunan sehingga sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi dan unsur gizi yang terkandung di dalamnya, serta aspek pendidikan dan kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemenuhan kebutuhan akan pangan dan gizi merupakan investasi masa depan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Rencana pembangunan daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat, terutama kebutuhan akan pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Berkaitan dengan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut, pemerintah masih dihadapkan pada sejumlah persoalan pokok dibidang ketahanan pangan dan gizi seperti rendahnya tingkat ketahanan pangan keluarga, terbatasnya akses keluarga dan masyarakat terhadap informasi pasar, masih banyak balita yang mengalami permasalahan gizi salah satunya adalah *stunting*.

*Stunting* (kerdil) merupakan masalah kesehatan yang dimana merupakan salah satu masalah gizi yang dapat menjadi ancaman bagi kualitas hidup manusia dimasa mendatang manusianya. *Stunting* adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur.(Kemenkes RI, 2018). Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO.

Persoalan *stunting* atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita sehingga memiliki tubuh terlalu pendek dibandingkan anak seusianya, masih menjadi tantangan besar yang dihadapi bangsa ini. Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan angka prevalensi *stunting* tertinggi di Asia pada 2018, setelah Timor Leste (50%) dan India (38%), yaitu sebesar 36,4%. Sementara itu, menurut Pusat Data dan Informasi Kemenkes tahun 2018, angka prevalensi *stunting* di Indonesia masih diatas 20%. Artinya, belum mencapai target WHO dibawah 20%. Menurut data Susenas, pada tahun 2013, prevalensi balita *stunting* nasional Indonesia berada di angka 30,8% dan mampu diturunkan menjadi 27,67% pada tahun 2019. Akan tetapi terjadinya wabah pandemi sejak Maret 2020, diperkirakan akan memperbesar prevalensi balita *stunting* di Indonesia.(kupangantaranews.com, 2020)

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menginstruksikan bahwa pembangunan SDM, termasuk anak merupakan fokus pembangunan pada tahun 2024. Oleh karena itu, menjadi kewajiban seluruh pihak untuk memperhatikan tumbuh kembang anak, mulai sejak dalam kandungan, bayi, sampai mereka memasuki masa emas. Menteri Bintang menegaskan perlunya membangkitkan kesadaran semua pihak akan pentingnya pencegahan *stunting* apalagi dengan adanya bencana non alam pandemi covid-19. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, juga menetapkan target angka *stunting* nasional agar bisa turun mencapai 14%.(Kemenpppa.go.id;2020).

Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa, Angka *stunting* yang tinggi ini sangat mengkhawatirkan, mengingat sumber daya paling berharga bagi suatu negara adalah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Masa depan bangsa kita berada di tangan 79,55 juta anak Indonesia (BPS,2019). Maka, dapat kita bayangkan pentingnya pemenuhan hak anak kita saat ini demi kualitas sumber daya dimasa depan. Adapun beberapa faktot penyebab *stunting* yaitu akibat pratek pengasuhan yang kurang baik, masih terbatasnya layanan kesehatan, masih kurangnya akses pada air bersih dan sanitasi. Untuk itu, seluruh pihak harus mengoptimalkan perbaikan gizi demi memastikan pemenuhan gizi seimbang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa potensi kerugian yang dialami negara akibat *stunting* bisa mencapai dua persen sampai tiga persen dari produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Angka itu terbilang besar sekali. Mengacu pada PDB 2019 sebesar Rp. 15.833,9 triliun, maka kerugian *stunting* bisa mencapai 474,9 triliun (Republika.co.id;2020).

Berdasarkan data kementerian kesehatan, Provinsi NTT merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menghadapi tantangan sumber daya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak (Profil kesehatan Indonesia). *Stunting* merupakan satu dari kebijakan politik Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi yang segera di itindaklanjuti.(mediaindonesia.com;2019).

Potensi kerugian ekonomi akibat *stunting* di Nusa Tenggara Timur pada 2018 mencapai 3% atau Rp.1,97 triliun dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

sebesar Rp. 99,09 triliun. Saat ini sebanyak, 269.658 balita *stunting* di NTT dikhawatirkan berdampak terhadap kehilangan generasi emas, dan bonus demografi di daerah itu tertunda melampaui 2035. Di Tingkat Nasional, potensi kerugian ekonomi akibat *stunting* setiap tahunnya antara 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dari angka tersebut, potensi kerugian ekonomi Indonesia antara Rp260 triliun-Rp390 triliun per tahun. World Bank merilis PDB Indonesia pada 2016 sebesar Rp13.000 triliun. Sebaliknya, jika *stunting* berhasil diturunkan, negara akan memperoleh keuntungan ekonomi sampai 48 kali lipat dari intervensi yang dikeluarkan.(mediaindonesia.com,2019)

**Tabel 1.1**  
**Data Status Gizi Balita per Kabupaten/Kota Tahun 2019**

No	Kabupaten/Kota	Wasting (Balita Kurus)	Underweight (Balita Gizi Kurang)	Stunting
1.	Kota Kupang	1.436	2.730	3.929
2.	Kabupaten Kupang	3.104	7.259	9.207
3.	Kabupaten TTS	2.461	6.934	11.781
4.	Kabupaten TTU	884	4.672	7.456
5.	Kabupaten Belu	867	3.052	3.661
6.	Kabupaten Malaka	1.327	3.134	4.452
7.	Kabupaten Alor	1.115	1.777	3.390
8.	Kabupaten Lembata	458	959	1.588
9.	Kabupaten Flores Timur	1.200	3.275	4.812
10.	Kabupaten Sikka	955	2.915	4.096
11.	Kabupaten Ende	541	1.827	3.070
12.	Kabupaten Nagekeo	322	1.184	2.006
13.	Kabupaten Ngada	102	762	1.207
14.	Kabupaten Manggarai Timur	1.145	2.110	3.476

15.	Kabupaten Manggarai	705	1.448	3.008
16.	Kabupaten Manggarai Barat	989	1.953	3.254
17.	Kabupaten Sumba Barat Daya	989	1.953	3.254
18.	Kabupaten Sumba Barat	500	1.051	1.448
19.	Kabupaten Sumba Tengah	186	850	1.854
20.	Kabupaten Sumba Timur	721	1.779	3.019
21.	Kabupaten Sabu Raijua	609	1.460	1.598
22.	Kabupaten Rote Ndao	862	1.989	2.483
	<b>TOTAL</b>	<b>21.464</b>	<b>56.128</b>	<b>84.299</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTT,2020

NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan angka *stunting* yang sangat tinggi. Kasus *stunting* menjadi persoalan nasional dan momok bagi NTT terkhususnya di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang menduduki urutan ke dua sebagai daerah dengan kasus *stunting* tertinggi di NTT. Kasus *stunting* pada anak di Kabupaten Kupang lebih banyak dialami anak yang berasal dari keluarga miskin. Jumlah penderita *stunting* atau kekerdilan di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah merupakan yang tertinggi di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.(Kupangantaraneews,2019)

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penderita *Stunting* pada tujuh (7) di desa Kecamatan Kupang Tengah Tahun 2019**

No	Desa	Jumlah Penderita Stunting (orang)
1.	Noelbaki	82
2.	Oelnasi	55
3.	Oelpuah	41
4.	Tanah Merah	34
5.	Oebelo	10
6.	Penfui Timur	41
7.	Mata Air	35

Sumber : Puskesmas Tarus, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah penderita *stunting* di desa Noelbaki berjumlah 82 orang dan di desa Oelnasi berjumlah 55 orang. Pada penelitian ini dipilihlah 2 (dua) desa yang ada di Kecamatan Kupang Tengah yaitu Desa Noelbaki dan Desa Oelnasi. Alasannya adalah karena kedua desa ini merupakan desa yang jumlah angka *stunting*nya tinggi dibandingkan desa-desa lainnya di Kecamatan Kupang Tengah. Masalah *stunting* tidak bisa hanya diselesaikan oleh sektor kesehatan, harus ada intervensi secara holistik dan intergrasi. Salah satunya dengan mengoptimalkan dana desa untuk mengurangi angka *stunting* di desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ruru, kalangi and Budiarmo,2017). Fungsi desa yang sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Indonesia, baik dibidang pemerintahan ekonomi dan social kemasyarakatan, maupun tugas-tugas pembangunan di Indonesia, baik dibidang pemerintahan ekonomi dan social kemasyarakatan, maupun tugas-tugas pembangunan kesehatan, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggara pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Dalam mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut desa diberikan sumber-sumber pendapatan, salah satunya adalah Dana Desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.(Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa). Dengan adanya dana desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelolah dana desa dengan efektif dan akuntabel.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang, Charles E Panie menyatakan penambahan anggaran dana desa sebesar Rp. 2 miliar sehingga alokasi dana desa tahun 2019 sebesar Rp.165 miliar. Menurutnya anggaran dana desa memiliki manfaat yang besar karena mendorong percepatan pembangunan (Republika.co.id:2019). Direktur Jendral (Dirjen) Pengembangan Daerah Tertentu (PDTU), Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Aiyah Gamawati mengatakan dalam kurun lima tahun pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp. 533,97 miliar yang dialokasikan bagi 160 desa di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.(Kupangantaranews,2019) Desa Noelbaki dan Desa Oelnasi menerima Dana desa dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Dana Desa pada 2 (dua) desa di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019-2020 (miliaran Rupiah)**

No	Desa	Dana Desa (2019)	Dana Desa (2020)
1.	Noelbaki	1,040,833,000	1,706,852,000
2.	Oelnasi	809,731,000	816,773,000

Sumber : <https://sid.kemendesa.go.id.2020>



Berdasarkan pada tabel 1.3, pada tahun 2019 Desa Noelbaki menerima dana desa sebesar Rp.1,040,833,000 dan di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 474,913,938. Sedangkan Desa Oelnasi menerima dana desa sebesar Rp.809,731,000 di tahun 2019 dan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.429,051,802 di tahun 2020. Penggunaan Dana desa ini digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan *stunting*. Dana desa yang diterima oleh 2 (dua) desa yang ada di Kecamatan Kupang Tengah jumlahnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena pada masing-masing desa tersebut berbeda jumlah penduduk desanya, jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah desanya.

Dengan adanya dana desa tersebut pemerintah desa mampu menjalankan kewajibannya. Sudah sepatutnya dana desa dialokasikan dan digunakan untuk pembangunan desa terkhususnya dalam mengatasi masalah-masalah yang ada didesa. Deputi bidang kesehatan dan lingkungan Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia) menyatakan bahwa alokasi dana desa tidak hanya untuk sekedar pembangunan infrastruktur. Dana desa sesungguhnya dapat digunakan dalam pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Hal itu merupakan suatu bentuk intervensi pencegahan *stunting*. *Stunting* yang menjadi isu nasional harus menjadi prioritas kepala daerah dengan mengintruksikan penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanggulangan *stunting* (Semarang kominfo:2019).

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Anggaran Yang Dialokasikan Untuk Penanganan *Stunting***  
**Pada 2 (dua) desa di Kecamatan Kupang Tengah**  
**Tahun Anggaran 2019-2020**

No	Desa	Anggaran (rupiah)	
		2019	2020
1.	Noelbaki	63.000.000	168.525.000
2.	Oelnasi	60.650.000	111.992.000

*Sumber : Kantor Desa Noelbaki, Kantor Desa Oelnasi, 2021*

Pada tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa besarnya jumlah angggaran yang dialokasikan untuk penanganan *stunting* pada desa Noelbaki di tahun 2019 adalah sebesar Rp.63.000.000 dan mengalami peningkatan di tahun 2020 yaitu berjumlah Rp. 168.525.000 sedangkan pada desa Oelnasi jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penanganan *stunting* di tahun 2019 adalah sebesar Rp.60.650.000 dan mengalami peningkatan ditahun 2020 yaitu berjumlah Rp. 111.992.000. Besarnya alokasian anggaran untuk penanganan *stunting* di desa Noelbaki tahun 2020 lebih besar dibandingkan desa Oelnasi karena angka *stunting* di desa Noelbaki adalah yang paling tertinggi dibandingkan desa-desa yang ada di kecamatan Kupang Tengah. Hal ini terjadi demikian karena di desa Oelnasi lebih banyak menggunakan anggaran dana desa untuk penanganan covid19.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang penulis uraikan, sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pemanfaatan Dana Desa dalam pencegahan dan penanganan *stunting* pada 2 (dua) desa di Kecamatan Kupang Tengah yang dimana dua desa tersebut terdapat penderita *stunting* tertinggi dibandingkan desa-desa lainnya yang berada di wilayah

Kecamatan Kupang Tengah.. Dengan melihat fenomena yang terjadi. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Program Pencegahan Dan Penanganan Stunting Studi Kasus Desa Noelbaki Dan Desa Oelnasi Di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran *stunting* pada Desa Noelbaki dan Desa Oelnasi ?
2. Bagaimana pemanfaatan dana desa dalam program pencegahan dan penanganan *stunting* pada desa Noelbaki dan Desa Oelnasi ?
3. Apa hambatan dalam pemanfaatan dana desa untuk pencegahan dan penanganan *stunting* pada desa Noelbaki dan Desa Oelnasi ?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang telah diuraikan diatas , maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran *stunting* pada Desa Noelbaki dan Desa Oelnasi.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dalam program pencegahan dan penanganan *stunting* pada desa Noelbaki dan desa Oelnasi.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pemanfaatan dana desa dalam program pencegahan dan penanganan *stunting* pada desa Noelbaki dan desa Oelnasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pemanfaatan dana desa dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting* pada desa Noelbaki dan desa Oelnasi.

Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

- a) Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi pemerintah desa di Kecamatan Kupang Tengah dalam memanfaatkan dana desa agar lebih efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.
- b) Sebagai sumbangan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.